Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax'

Kurniawan Hari Siswoko

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: kurniawans@fikom.untar.ac.id

ABSTRACT

The massive and rapid spreading of fake news through the internet and social media has prompted the government to take steps to contain the hoaxes. Initially, the government was confident that the spread of fake news could be countered by blocking a number of irresponsible newsite. This research argues that the blocking of the newsite will not be effective in countering fake news. Thus, the government would need additional measures to deal with the massive and rapid spread of fake news through the internet. This research is conducted through observation and content analysis of media reports about the government policies regarding the spread of fake news. According to Berelson (1952) content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication. Holsti (1968) says that it is any technique for making inferences by systematically and objectively identifying specified characteristics of messages. This research found several other measures the government has taken that includes the establishment of a special agency to deal with the cyberspace and collaborations with the Press Council and Facebook to strengthen its efforts.

Keywords: *fake news, government policies, national cyber agency, hoax*

ABSTRAK

Penyebaran berita palsu secara masif dan cepat di internet and media sosial mendorong pemerintah untuk mengambil langkah demi menangkal hal itu. Awalnya, pemerintah meyakini bahwa penyebaran berita palsu tersebut bisa ditangkal dengan memblokir sejumlah situs internet yang bermasalah. Penelitian ini meyakini bahwa pemblokiran situs internet tidak akan efektif dalam membendung penyebaran berita palsu. Oleh karena itu, pemerintah akan membutuhkan langkah lainnya untuk mengatasi maraknya penyebaran berita palsu di internet. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan analisis isi pemberitaan di media massa, khususnya Kompas dan The Jakarta Post. Menurut Berelson (1952) content analysis adalah teknik penelitian untuk penggambaran kuantitatif, sistematis dan obyektif atas isi komunikasi. Holsti (1968) menyatakan ini adalah teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik sebuah pesan secara sistematis. Kerlinger (1986) berpendapat content analysis adalah metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, obyektif dan kuantitatif dengan tujuan mengukur beberapa variable. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah lain diluar pemblokiran situs. Langkah-langkah itu adalah dengan pembentukan Badan Siber Nasional dan langkah kerjasama dengan Dewan Pers serta Facebook.

Kata kunci: *berita palsu, kebijakan pemerintah, badan siber nasional, hoax*

1. PENDAHULUAN

Beberapa waktu belakangan ini maraknya penyebaran berita palsu (*fake news*) atau dikenal juga dengan istilah *hoax*, khususnya melalui jejaring media sosial online, makin mengkhawatirkan. Penyebaran berita palsu itu tidak cuma membodohi masyarakat dengan sajian informasi yang tidak benar, namun tindakan tersebut juga dipakai pihak-pihak tertentu untuk menghasut dan memecah belah masyarakat dan pada gilirannya akan membahayakan sendi-sendi persatuan bangsa.

Beberapa media utama di tanah air, seperti surat kabar *Kompas* dan *The Jakarta Post*, melaporkan dalam pemberitaannya bahwa Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat, mengalami permasalahan serius soal penyebaran berita palsu.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah secara tegas menyatakan perang terhadap penyebaran berita palsu. Begitu besarnya dampak yang ditimbulkan penyebaran berita palsu ini

sehingga banyak pengamat menyebutnya sebagai “penyakit kanker yang menggerogoti demokrasi”. Sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam memerangi penyebaran berita palsu ini, Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan ancaman untuk memproses hukum pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu (“*Unreliable online news*”, 2017). Namun demikian kebijakan ini dikritik sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat (*freedom of speech*).

Dalam salah satu pernyataannya di media massa, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan bahwa berita palsu yang beredar di media sosial sepanjang hari membawa dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, semakin cepat masalah itu bisa diatasi akan semakin baik.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran berita palsu (*hoax*) adalah dengan memblokir situs internet (*website*) yang dinilai sebagai sumber informasi palsu. Terkait kebijakan pemblokiran situs tersebut, pemerintah telah menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan untuk memblokir situs tertentu pertimbangan utamanya adalah isi (*content*) dari situs bersangkutan bukan afiliasi politik pengelola situs tersebut.

“Sepanjang situs tersebut menyebarkan isi yang melanggar peraturan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas,” kata Menteri Rudiantara seperti dikutip surat kabar *The Jakarta Post* (“*Govt to continue*”, 2017). Sampai dengan bulan Desember 2016, pemerintah telah memblokir 800,000 situs internet, sebagian besar berisi pornografi dan perjudian. Sekitar 85 situs diantaranya adalah situs terkait ajaran radikalisme.

Peneliti yakin bahwa upaya memerangi penyebaran berita palsu di internet tidak cukup hanya dengan melakukan pemblokiran situs. Dengan kemajuan teknologi dan kemudahan dalam membuat *website*, pemblokiran situs menjadi tidak efektif dalam menangkal penyebaran berita palsu. Pemerintah bisa memblokir ribuan situs, namun dalam waktu yang tidak lama akan muncul situs-situs baru yang semacamnya. Penelitian ini akan membahas upaya lain pemerintah dalam memerangi penyebaran berita palsu di jejaring internet.

Sebelum sampai pada kegiatan penelitian atau observasi, peneliti perlu menggambarkan bagaimana proses penyebaran informasi bekerja. Menurut West dan Turner (2014) dalam bukunya *Introducing Communication Theory*:

Mass communication refers to communication to a large audience via one of these channels of communication. Although mass communication frequently refers to “traditional” venues (e.g., newspapers), we expand our discussion to include new media, which encompasses computer-related technology.

Secara ringkasi dipahami bahwa komunikasi massa komunikasi kepada audien dalam skala besar melalui salah satu sarana komunikasi yang ada. Meskipun lebih sering mengacu pada sarana tradisional seperti surat kabar, dalam pembahasan ini sarana dimaksud termasuk media baru yang memanfaatkan teknologi computer.

Dengan menggunakan kerangka definisi tersebut, penyebaran informasi melalui sosial media online/internet termasuk ke dalam komunikasi massa. Dengan demikian, teori komunikasi massa bisa diaplikasikan terhadap penyebaran informasi melalui jejaring media sosial. Ada berbagai cabang dalam Teori Komunikasi Massa dan penelitian ini sudah barang tentu menggunakan cabang yang relevan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan melakukan *content analysis* atas laporan pemberitaan media terkait penyebaran berita palsu (*fake news/hoax*) dan upaya pemerintah untuk menangkalnya.

Pengertian "*content*" dalam istilah "*content analysis*" adalah "isi" dan *content analysis* adalah analisa atas isi yang terkandung dalam sebuah pesan. Content analysis bisa dilihat sebagai sebuah metode dimana isi sebuah pesan membentuk dasar untuk membuat suatu kesimpulan atas pesan tersebut (Nachmias and Nachmias, 1976).

Selanjutnya, *content analysis* mencakup kegiatan observasi dan analisa dokumen. Hal itu didefinisikan sebagai sebuah metode observasi dalam pengertian tidak meminta publik untuk menjawab pertanyaan, melainkan menanyai mereka mengenai hal apa yang mereka komunikasikan (Kerlinger, 1973). Oleh karenanya, ini juga dianggap sebagai metode penelitian sosial yang non-reaktif.

Menurut Berelson (1952) *content analysis* adalah teknik penelitian untuk penggambaran kuantitatif, sistematis dan obyektif atas isi komunikasi. Holsti (1968) menyatakan ini adalah teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik sebuah pesan secara sistematis. Kerlinger (1986) berpendapat *content analysis* adalah metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, obyektif dan kuantitatif dengan tujuan mengukur beberapa variabel.

Peneliti mengamati beberapa pemberitaan media khususnya menjelang persiapan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tanggal 15 Februari 2017 dimana persaingan para pasangan calon telah mendorong masing-masing kubu pendukung untuk melakukan kampanye negatif dengan menyebarkan berita palsu.

Periode waktu menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dipilih sebagai obyek penelitian karena event tersebut dianggap menggambarkan kondisi politik tanah air secara nasional. Partai politik di tanah air menjadikan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta sebagai ajang pertarungan dan persiapan menuju Pemilihan Presiden 2019. Itulah mengapa partai-partai politik sangat *all out* dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan atas pernyataan, komentar dan rencana pemerintah dalam upaya menangkal penyebaran berita palsu. Observasi dilakukan tidak melalui prosedur yang rigid tertentu melainkan dengan menentukan pemberitaan mana yang terkait upaya pemerintah menangkal penyebaran berita palsu. Dari pemberitaan tersebut, kemudian dilihat dan dianalisis pemberitaan yang mana yang bisa dianggap menggambarkan upaya pemerintah Indonesia untuk menangkal penyebaran berita palsu.

3. HASIL PENELITIAN

Penyebaran berita palsu sudah sangat mengkhawatirkan sehingga pemerintah berulang kali mengingatkan dampak negatif dan bahaya dari fenomena tersebut. Pengumpulan data kegiatan penelitian ini dilakukan dengan observasi atas pemberitaan yang ada di media surat kabar, khususnya harian *Kompas* dan *The Jakarta Post*.

Untuk melihat dan memahami pesan yang terkandung dalam berita yang dimuat dalam surat kabar tersebut, peneliti melakukan observasi dan analisis isi atas pemberitaan tersebut. Sesuai dengan pengertian *content analysis* yang disebutkan sebelumnya, Holsti (1968) misalnya menyatakan ini adalah teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik

sebuah pesan secara sistematis. Kerlinger (1986) berpendapat *content analysis* adalah metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, obyektif dan kuantitatif dengan tujuan mengukur beberapa variabel.

Variabel yang dimaksud, misalnya adalah menentukan berita yang akan dianalisa. Dari berbagai berita yang dimuat dalam surat kabar, peneliti menentukan berita yang akan dianalisa adalah teks berita yang terkait penyebaran berita palsu dan upaya pemerintah untuk menangkalnya. Saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pekalongan, Jawa Tengah, awal Januari 2017 Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat mengenai hal ini.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa media sosial memiliki dampak bahaya khususnya terkait penyebaran berita palsu. Beliau mengatakan penyebaran berita palsu akan membawa bangsa ini ke disintegrasi atau perpecahan menjadi kelompok-kelompok berdasarkan suku, agama dan ras. Bahaya disintegrasi itu makin nyata karena masyarakat dengan sangat mudah bisa mengakses informasi melalui layar telepon pintar. Presiden Jokowi menegaskan:

“Ada berita palsu dan ada berita terpercaya. Ada fitnah dan ada kebenaran. Ada pihak-pihak yang melakukan fitnah dan ada yang tidak. Era informasi ini sangat terbuka. Kita perlu menyaring informasi yang tersebar. Jika tidak persatuan bangsa akan terancam.”
(“Main danger”, 2017)

Dari pernyataan Presiden tersebut bisa digarisbawahi bahwa kata kunci yang penting adalah perlunya “menyaring informasi yang tersebar”. Presiden menegaskan bahwa tidak semua informasi yang beredar di masyarakat, khususnya yang beredar melalui media sosial di Internet, mengandung kebenaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Banyak informasi yang beredar adalah informasi palsu dan bersifat fitnah.

Contoh informasi palsu yang disebarkan melalui Internet menyebutkan adanya jutaan tenaga kerja dari China yang masuk ke Indonesia. Masuknya jutaan tenaga kerja dari China dikhawatirkan akan mengambil alih lapangan kerja di dalam negeri. Informasi tersebut diduga disebarkan untuk menimbulkan sentimen anti-China. Hal tersebut diduga terkait dengan pencalonan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kebetulan keturunan China.

Informasi palsu lain menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi cenderung mengakomodasi kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan partai terlarang, Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan ada informasi bahwa Presiden adalah keturunan PKI. Informasi palsu lain menyebutkan mata uang yang baru menampilkan gambar “palu arit”, identik dengan lambang PKI.

Beberapa waktu lalu juga tersebar berita di internet Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengadakan jumpa pers menjelaskan sebuah isu tertentu. Yang aneh dari kegiatan tersebut adalah Kapolri mengenakan topi Sinterklas. Tentu saja penyebaran informasi atau foto semacam itu disertai keterangan foto yang dikarang sesuai kemauan si penyebar informasi akan cenderung menyesatkan masyarakat dan merugikan Kapolri dan lembaga kepolisian.

Presiden sudah beberap kali memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi dalam menangkali isu tersebut. Selain memblokir sejumlah website, pemerintah juga berencana mempercepat pembentukan lembaga terintegrasi yang khusus

menangani penyebaran disinformasi melalui Internet atau cyberspace atau Badan Siber Nasional (BSN).

Menurut pemberitaan Kompas 5 Januari 2017 ("50 ahli IT", 2017), Badan Siber Nasional itu akan melibatkan paling tidak 50 ahli Teknologi Informasi (IT). Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa para ahli IT diikutkan dalam pendidikan di berbagai institusi baik di dalam maupun luar negeri. Mereka juga akan diberikan materi bela negara.

"Mereka akan kami latih bela negara selama enam bulan karena mereka akan memegang rahasia negara," kata Ryamizard. ("50 ahli IT", 2017)

Pembentukan badan siber tersebut bertujuan untuk memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan dan menertibkan perdagangan elektronik. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menangkal penyebaran berita palsu antara lain adalah melalui kerjasama dengan Dewan Pers serta Facebook dan Twitter. Melalui kerjasama dengan Dewan Pers, pemerintah ingin media massa yang ada di tanah air diverifikasi untuk memastikan perusahaan pers di tanah air menjunjung tinggi demokrasi, keadilan, kepentingan publik dan profesionalitas dalam menjalankan fungsinya.

Kerjasama dengan Dewan Pers adalah tindak lanjut dari Piagam Palembang yang disepakati perwakilan perusahaan media pada tanggal 9 Februari 2010. Piagam tersebut berisi kesepakatan dan kesadaran media untuk melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan dan Standar Kompetensi Wartawan (Dewan Pers, 2010). Melalui Piagam tersebut, perwakilan perusahaan media juga memberikan mandat kepada lembaga independen yang dibentuk Dewan Pers untuk melakukan verifikasi atas pelaksanaan kesepakatan tersebut. Verifikasi media tersebut diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas perusahaan media, menjaga pemberitaan yang berimbang dan adil serta mengurangi berita yang bersifat tendensius dan pada gilirannya mengurangi penyebaran berita palsu.

Sementara itu, upaya lain pemerintah untuk menangkal penyebaran berita hoax adalah dengan merangkul Facebook, salah satu jejaring sosial online yang sangat populer di kalangan pengguna di Indonesia. Mengapa Facebook? Karena banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan jejaring media sosial tersebut. Menurut data Oktober 2016, Facebook merupakan jejaring media sosial paling populer di Indonesia dengan jumlah pengguna mencapai 70 juta orang. Posisi kedua adalah Instagram dengan 19,9 juta pengguna dan selanjutnya Twitter dengan 14,5 juta pengguna ("*Government turns*", 2017).

Pemerintah memutuskan untuk bekerjasama dengan Facebook sesudah mempelajari apa yang dilakukan raksasa jejaring media sosial tersebut di Amerika Serikat dalam merespon tuduhan bahwa jejaring sosial itu berperan menyebarkan hoax selama kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Merespon tuduhan itu, Facebook kemudian mengambil inisiatif dengan bermitra dengan lembaga PolitiFact and Associated Press untuk mengidentifikasi berita sungguhan dan membedakannya dari berita palsu. Pengguna Facebook dimungkinkan melaporkan berita yang mereka anggap sebagai hoax dan Facebook akan meneruskannya ke kedua lembaga "fact-checker" tersebut, PolitiFact dan Associated Press.

Berita-berita yang “tidak lolos uji” akan ditandai dengan “disputed” atau diperselisihkan dan kemudian pengguna Facebook bisa meng-klik sebuah link tertentu untuk mencaritahu alasannya.

Tabel 1. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran berita *hoax*

No.	Kebijakan Pemerintah	Target
1.	Pemblokiran situs yang bermasalah	Situs tidak bisa diakses lagi
2.	Pembentukan Badan Siber Nasional	Sebagai payung/regulator seluruh aktifitas di dunia siber
3.	Kerjasama dengan Dewan Pers	Verifikasi media untuk memastikan perusahaan media bekerja secara profesional
4.	Kerjasama dengan Facebook	Meningkatkan penyaringan berita untuk mengurangi penyebaran berita <i>hoax</i>

Sumber: Dari berbagai sumber

4. KESIMPULAN

Dari observasi atas pemberitaan media dan analisis isi berita, khususnya di surat kabar *Kompas* dan *The Jakarta Post*, penelitian ini menemukan beberapa kebijakan yang akan dan sedang dilaksanakan pemerintah dalam upaya menangkal penyebaran berita palsu atau *hoax* di jejaring media sosial. Awalnya, pemerintah meyakini bahwa penyebaran berita palsu di jejaring media sosial bisa ditangkal dengan memblokir situs yang diduga sering menyebarkan berita palsu, provokasi dan fitnah. Pemerintah sudah melakukan pemblokiran sejumlah situs bermasalah tersebut. Namun, belakangan pemerintah menyadari bahwa langkah pemblokiran situs tersebut tidak efektif.

Kemudian pemerintah melakukan beberapa langkah lain untuk menangkal penyebaran berita palsu. Langkah yang dimaksud adalah dengan membentuk lembaga nasional yang akan bertugas mengelola seluruh kegiatan siber yang melibatkan/membawa dampak terhadap individu, organisasi maupun perusahaan di Indonesia. Pemerintah juga menjalin kerjasama dengan Dewan Pers dan raksasa internet global, khususnya Facebook, untuk membantu menangkal penyebaran informasi *hoax*.

Penelitian ini belum menyeluruh dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, bagi pembaca atau peneliti lainnya disarankan menggali lebih jauh lagi dan lebih detil tentang efektifitas kebijakan yang diambil pemerintah, tentunya selain langkah pemblokiran yang dinilai kurang efektif dan banyak dikritik masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih khususnya ditujukan kepada jajaran pimpinan Universitas Tarumanagara dan khususnya pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Sdr Adnuri Mohamidi dari Pusinfo The Jakarta Post yang telah membantu membagi data pemberitaan mengenai upaya pemerintah dalam menangkal penyebaran berita palsu atau *hoax*.

REFERENSI

- Dewan pers selesaikan standar kompetensi wartawan* (2010). Diakses dari <http://dewanpers.or.id/piagampalembang> tanggal diakses 12 Februari 2017.
- 50 Ahli IT akan perkuat Badan Siber Nasional (2017, 5 Januari). *Kompas*. Diakses dari <http://www.kompas.com> tanggal 12 Februari 2017.

- Government turns to Facebook to fight fake news.* (2017, 31 Januari). *The Jakarta Post*. Diakses dari <http://www.thejakartapost.com> tanggal 12 Februari 2017
- Govt to continue crackdown on web.* (2017, 20 Januari). *The Jakarta Post*. Diakses dari <http://www.thejakartapost.com> tanggal 12 Februari 2017.
- Main danger of information are lies and slander says Jokowi.* (2017, 9 Januari). *The Jakarta Post*. Diakses dari <http://www.thejakartapost.com> 12 Februari 2017.
- Prasad, D. (2008). Content Analysis: A method in Social Science Research. In Lal Das, D.K and Bhaskaran, V (eds.). *Research methods for social work* (pp.173-193). New Delhi: Rawat.
- Unreliable online news to be labelled hoax.* (2017, 13 Januari). *The Jakarta Post*. Diakses dari <http://www.thejakartapost.com> tanggal 12 Februari 2017.
- West, R. & Turner, L. H. (2014). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. New York: McGraw Hill.